



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

08 DEC 2020
210

07 DEC 2020

40278

Nomor : 9670/2/KPG.02.02/XII.2020

2 Desember 2020

Lampiran : 2 (dua) lembar

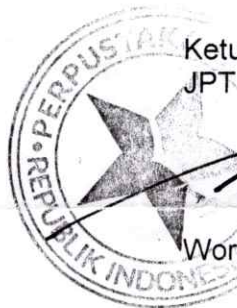
Perihal : Seleksi Terbuka dan Kompetitif
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Perpustakaan Nasional

Yth. : Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama dan Sekretaris Daerah Provinsi
di Tempat.
(daftar terlampir)

Bersama ini kami informasikan bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional, akan diselenggarakan Seleksi Terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat memberitahukan pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional dimaksud kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara. Informasi selanjutnya terkait dengan seleksi terbuka ini dapat dilihat pada situs resmi Perpustakaan Nasional di <http://seleksijpt.perpusnas.go.id>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.



Ketua Panitia Seleksi
JPT Pratama Perpusnas,

Woro Titi Haryanti
Woro Titi Haryanti

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Perpustakaan Nasional;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Bidang Mutasi

Tindak Lanjut

lemba promosi
- info dan yg berminat *12/12/20*

SEKTA
07 DEC 2020

Lampiran Surat

Nomor : 9670/2/KPG.02.02/XII.2020

Tanggal : 2 Desember 2020

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Agama;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Kementerian Kesehatan;
14. Kementerian Sosial;
15. Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Kementerian Perindustrian;
17. Kementerian Perdagangan;
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Kementerian Perhubungan;
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Kementerian Pertanian;
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Kementerian Pariwisata;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Kementerian Sekretariat Negara;
35. Kementerian Arsip Nasional Republik Indonesia;
36. Badan Informasi Geospasial;
37. Badan Intelijen Negara;
38. Badan Kepegawaian Negara;
39. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
40. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
41. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
42. Badan Narkotika Nasional;
43. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
44. Badan Keamanan Laut;
45. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
46. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
47. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
48. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
49. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
50. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
51. Badan Pusat Statistik;
52. Badan SAR Nasional;
53. Badan Standardisasi Nasional;
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
55. Lembaga Administrasi Negara;

56. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
57. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
58. Lembaga Ketahanan Nasional;
59. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
60. Lembaga Sandi Negara.

DAFTAR PEMERINTAH PROVINSI

1. Sekda Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
2. Sekda Provinsi Sumatera Utara
3. Sekda Provinsi Sumatera Barat
4. Sekda Provinsi Riau
5. Sekda Provinsi Kepulauan Riau
6. Sekda Provinsi Jambi
7. Sekda Provinsi Sumatera Selatan
8. Sekda Provinsi Bangka Belitung
9. Sekda Provinsi Bengkulu
10. Sekda Provinsi Lampung
11. Sekda Provinsi DKI Jakarta
12. Sekda Provinsi Jawa Barat
13. Sekda Provinsi Banten
14. Sekda Provinsi Jawa Tengah
15. Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Sekda Provinsi Jawa Timur
17. Sekda Provinsi Bali
18. Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Sekda Provinsi Kalimantan Barat
21. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah
22. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan
23. Sekda Provinsi Kalimantan Timur
24. Sekda Provinsi Kalimantan Utara
25. Sekda Provinsi Sulawesi Utara
26. Sekda Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekda Provinsi Sulawesi Tengah
28. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Sekda Provinsi Sulawesi Selatan
30. Sekda Provinsi Gorontalo
31. Sekda Provinsi Maluku
32. Sekda Provinsi Maluku Utara
33. Sekda Provinsi Papua Barat
34. Sekda Provinsi Papua